

BAB III

ANALISIS PERAN INDONESIA DALAM MEMPERSIAPKAN ASEAN COMMUNITY

2015

Dalam bab ini penulis akan menguraikan rumusan masalah yang ada untuk dianalisa menggunakan Konsep Integrasi dari Joseph Nye. Dalam pembahasannya, penulis akan membahas masing-masing Variabel yakni konsep Integrasi ekonomi untuk menganalisa ASEAN Economic Community, konsep Integrasi Sosial untuk menganalisa ASEAN Socio-cultural Community dan konsep politik untuk menganalisa ASEAN Political Security Community.

3.1 Integrasi Ekonomi

Nye dalam bukunya menjelaskan adanya interdependensi terhadap ekonomi atas hubungan antara negara-negara dalam hal ini jika dikaitkan di regional Asia Tenggara adalah ASEAN. terdapat pendapat dari Nye terhadap Integrasi ekonomi yakni *pertama* Interdependensi perdagangan (*trade Interdependence*) yang artinya adanya proporsi ekspor negara terhadap total ekspor di regional, *Kedua* Jasa-jasa bersama (*shared services*) yakni jumlah total belanja tahunan pekerjaan yang ditanggung bersama termasuk administrasi skema integrasi perdagangan di kawasan sebagai presentase dari GNP (*gross national product*). (Nye, 1971)

Perdagangan dan Jasa

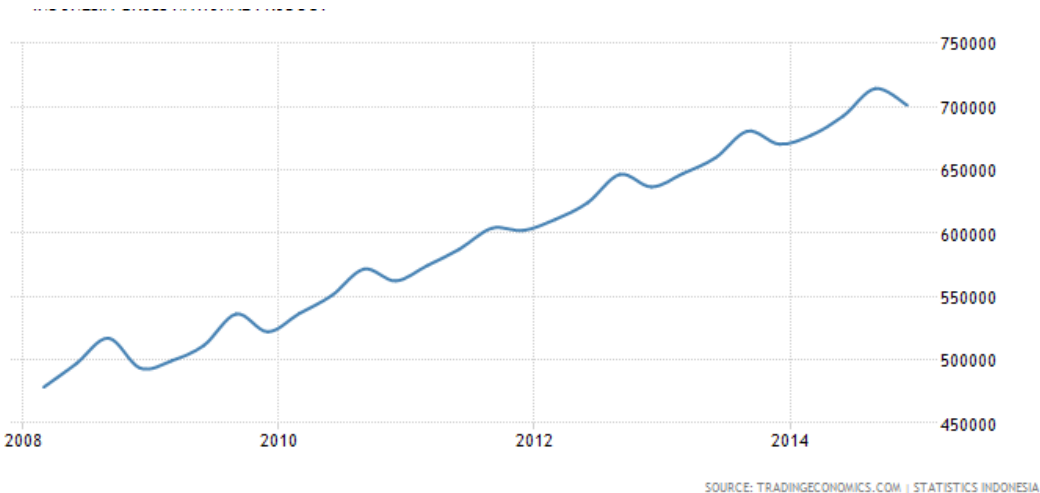
ASEAN jika dilihat dari bidang ekonomi sudah relative kuat untuk berada di komunitas ekonomi global. Karena adanya ekspor ASEAN sebesar US\$ 1.29 triliun pada 2014 tepat satu tahun sebelum berjalannya ASEAN Economic Community. Angka diatas menunjukkan jumlah

yang besar dika dibaninksn dengsn Regionsl lain pada tahun tersebut sehingga dalam ekonomi global ASEAN cukup dapat bersaing.(BPS, 2015)

Disamping itu dengan lebih dari 620 juta jiwa masyarakat yang hidup di Asia Tenggara, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat potensial dan konsumtif terhadap barang dan jasa yang ada oleh karena itu banyak industry yang menginvestasikan uangnya ke ASEAN karena adanya jumlah yang besar terhadap populitas di ASEAN namun dibalik itu, ASEAN juga dapat menyeimbangi apa yang terjadi karena barang-barang dari ASEAN juga cukup diminati di global.

Indonesia saat ini memiliki jumlah ekspor yang juga cukup besar dengan total US\$ 168.8 milyar paada saat bersamaan tahun 2014. Nilai tersebut membuat peringkat Indonesia berada di urutan ke empat setelah Singapura, Thailand dan Vietnam yang masing-masing memiliki export yang lebih banyak terhadap jumlah total dari nilai expor ASEAN. untuk perdagangan internal ASEAN Indonesia mengexport lebih dari 30% barangnya untuk dapat dikonsumsi oleh negara ASEAN lainnya namun nilai tersebut masih kalah dengan Thailand karena presentase Thailand relative selalu lebih besar dibandingkan Indonesia.(Anshari, Khilla, & Permata, 2017)

Indikator disamping perdagangan dalam membangun integrasi kawasan terdapat jasa. Tolak ukur dari pengeluaran untuk jassa terhadap GNP Indonesia terhadap ASEAN. dalam GNP di ASEAN, Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar dibanding negara laiinya di ASEAN seperti Philipina dan Malaysia yang jauh dibandingkan Indonesia



(tradingeconomics.com)

Data diatas menunjukan tran yang terus naik setiap tahunnya terhadap GNP Indonesia dan ini merupakan bukti Indonesia kuat dalam transaksi yang terjadi di negaranya. Lalu menguatkan pendapatan yang ada di Indonesia.

Melihat salah satu contoh yang telah dibahas beberapa peran Indonesia didalamnya akan mudah melihat variabel ini yakni contoh dari peran Indonesia di ASEAN dalam *The ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED)*. Indonesia menginisiasi untuk membentuk kerangka yang nantinya akan dipakai oleh seluruh Negara anggota ASEAN terutama Negara yang memiliki tingkat perekonomian yang relatif rendah di ASEAN. Hal ini termasuk dari bagian Struktural yang mana Indonesia mencoba adanya pemerataan tingkat perekonomian di ASEAN dan membentuk framework yang akan menjadi landasan bagi Negara ASEAN lainnya.

Peran lainnya seperti saat ASEAN menggagas *ASEAN Investment Fund (AIF)* berdampak kepada banyaknya FDI yang masuk ke ASEAN. karena adanya *Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)* menjamin para investor yang masuk ke kawasan Asia Tenggara menjadi lebih percaya untuk menanamkan modalnya. Jika para negara hanya mementingkan

dirinya sendiri maka akan adanya AIF tandingan di setiap negara ASEAN dan memiliki mekanisme yang dianggap sangat menguntungkan terhadap negaranya masing-masing. Sehingga para investor akan memilih negara yang menawarkan mekanisme yang sangat mudah serta dapat menguntungkan si pemberi investasi tersebut dan AIF yang telah digagas hanya akan menjadi pajangan ASEAN dalam mencari investor yang sudah tertarik dengan skema negara tertentu. Dalam kerjasama dibidang keuangan, Indonesia banyak memberikan kontribusi saat menjadi *Chairman of ASEAN*. rentan waktu 2010-2015 terjadi pelemahan ekonomi global namun pelemahan tersebut tidak memiliki dampak berarti bagi para anggota ASEAN. Hal tersebut karena adanya pengelolaan makro mikro ekonomi yang baik dan juga permintaan domestik ASEAN yang kuat berdampak kepada kinerja positif ekonomi di ASEAN.

3.2 Integrasi Sosial

Integrasi sosial dapat merujuk terhadap pertumbuhan komunikasi dan transaksi seperti perdagangan, pariwisata yang melintasi batas nasional suatu negara dan berwujud terhadap jaringan antar unit-unit non pemerintahan pada masyarakat transnasional. Integrasi sosial melibatkan kontak dan interaksi pribadi namun hal tersebut belum tentu dapat melibatkan kesadaran terhadap interdependensi karena adanya suatu masyarakat transnasional yang bias menimbulkan ketegangan dan konflik di kawasan.

Nye berpendapat bahwa ada dua jenis integrasi sosial yang membentuk konsep integrasi itu sendiri yakni Integrasi sosial masa dan Integrasi sosial elit. Integrasi sosial masa memiliki indikator seperti pengiriman informasi intra regional namun integrasi elit dapat dipahami lebih luas sebagai adanya kontak langsung antara masyarakat intraregional dengan beberapa indikator seperti adanya pertukaran mahasiswa intra regional, perjalanan intraregional, kelompok bisnis dan buruh yang melintasi batas-batas nasional.

Masa dan Elit

Di ASEAN, komposisi masyarakat yang heterogem membuat adanya banyak perbedaan yang mendasar atas anggota-anggota negaranya. Namun banyaknya perbedaan. Integrasi yang diperlukan di ASEAN yakni menyatukan perbedaan tersebut sehingga tidak adanya efek yang dapat mengganggu komposisi masyarakat di ASEAN.

Konsep Integrasi sosial masa meyakini adanya transaksi meliputi perdagangan, pengiriman informasi intra regional dan yang serupa dapat menyatukan dan mengintegrasikan dalam hal sosial. Karena adanya interaksi tersebut terbangun jaringan yang dapat mengakibatkan hilangnya gap yang diusahakan untuk dihapuskan menjadi berhasil.

Disisi lain, Konsep Integrasi sosial elit berpendapat bahwa adanya adanya pertukaran mahasiswa intra regional, perjalanan intraregional, kelompok bisnis dan buruh yang melintasi batas-batas nasional merupakan indikator berhasilnya Integrasi elit. Pertama pada adanya pertukaran mahasiswa intra kawasan dalam hal ini intra ASEAN, ASEAN telah memiliki ASEAN University Network yang mana memudahkan antara universitas melakukan pertukaran dari satu negara ke negara yang lain dan juga sebaliknya.(Nye, 1971)

Lalu mudahnya perjalanan intra regional yang kini dibebaskan visa kunjungan terhadap seluruh negara anggota ASEAN untuk mengunjungi negara-negara anggota lainnya. Hal ini berdampak kepada adanya konektifitas antara satu negara dan negara lainnya akan lebih mudah karena batasan yang dahulu ada kini makin dibuka dan akses masyarakat di satu negara anggota terhadap negara anggota lainnya di ASEAN semakin mudah.

Dari upaya tersebut akan terbangun struktur yang dapat dirasakan oleh Negara-negara ASEAN sehingga adanya persepsi dikawasan untuk memiliki rasa kebersamaan sehingga Integrasi di ASEAN akan terbangun dengan mudah melalui upaya yang telah dilakukan Indonesia dan dicoba untuk dijalankan oleh Negara-negara lain karena dampak yang dirasakan langsung kepada masyarakat dan masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan terhadap ASEAN.

Jika melihat apa yang terjadi sekarang di ASEAN, maka akan terlihat bagaimana hubungan antar Negara membuat ASEAN menjadi salah satu kawasan yang aman karena antar Negara ASEAN tidak bisa ikut campur dalam hal-hal yang terjadi di internalnya jika tidak diizinkan oleh Negara tersebut. Hal ini memiliki dua sisi yakni, sisi baik dan buruk. Disisi baik, akan terjamin struktur yang kokoh di ASEAN dan semua Negara akan taat dengan peraturan ASEAN dikarenakan peraturan yang dikeluarkan ASEAN merupakan kesepakatan oleh semua Negara ASEAN. Di sisi lain, akan susah jika ada konflik internal yang ada di suatu Negara dan Negara anggota lainnya menganggap apa yang terjadi di Negara tersebut perlu untuk ada campur tangan Negara anggota lainnya karena adanya kesamaan baik ras etnis maupun agama.(Stubbs, 2008)

Keterlibatan Indonesia dalam pilar sosial Budaya sangat signifikan. Dalam perannya, Indonesia mendorong berbagai bidang dalam pilar sosial budaya untuk dapat mewujudkan terbentuknya *ASEAN Community 2015*. Integrasi ASEAN yang ingin dibangun juga merupakan bagian dari pilar sosial budaya ini dan melalui poin-poin yang akan dibahas dibawah akan terlihat bagaimana keterlibatan Indonesia dalam membangun Identitas ASEAN melalui pilar sosial Budaya. Beberapa perannya seperti *ASEAN Youth Expo* di Jakarta dan menghasilkan pernyataan bersama terkait komunitas ASEAN 2015, peningkatan peran disabilitas di ASEAN

melalui *Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of Person with Disabilities in ASEAN Community*, menggagas *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* adalah salah satu dari upaya penjabaran dari *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Worker* ditahun 2007, dan juga memprakarsaiterbentuknya *Declaration on ASEAN Unity in Cultural Diversity: Towards Strengtening ASEAN Community* pada tahun 2011.

3.3 Integrasi Politik

Dalam integrasi politik, Nye membagi indikator terlaksanya dalam tiga cirri-ciri antara lain memiliki beberapa struktur internasional walau bentuknya sederhana, terdapat interdependensi dalam perumusan kebijakan, dan terdapat perasaan identitas yang sama dan kewajiban perumusan kebijaksanaan. Dari cirri tersebut Nye berpendapat bahwa dapat menjadi tiga bagian. Bagian yang dimaksud oleh Nye antara lain Integrasi Institusional dan Integrasi Kebijaksanaan dan masing masing bagian memiliki tolak ukur yang berbeda-beda.

Institusional

Dalam konsep integrasi politik. Integrasi Institusional sangatlah penting karena merupakan pengukur institusi yang ada di regional dalam integrasinya. Menurut Nye ada tolak ukur dari Institusional yakni yuridiksional di regional. Yuridiksi yang ada diregional dihargai dan dijalankan oleh seluaruh anggota ASEAN yang mana hal tersebut merupakan upaya dari mengintegrasikan ASEAN di Institusional.

Seperti dalam hal konflik yang terjadi oleh ASEAN dengan negara yang bukan merupakan negara anggota ASEAN maka harus adanya satu suara terkait hukum yang akan

digunakan. Pada pengimplementasiannya dapat dilihat di sengketa Laut China Selatan ASEAN yang beberapa negaranya terlibat konflik ingin menggunakan UNCLOS sebagai penyelesaian dari sengketa tersebut maka semua negara ASEAN yang bersengketa disana menggunakan hal yang serupa. Karena secara institusi akan tercapat kematangan bila semua negara anggota dapat menggunakan suara yang sama.(Hong, 2013)

Lalu juga seperti pada saat Indonesia Menggagas forum maritime ASEAN yang konserannya terhadap IUUF, para neara ASEAN bersebakat untuk menjaga atas yang akan terjadi di ASEAN dibidang kemaritiman karena adanya pembahasan IUUF untuk dapat menegakan hukum terhadap penangkapan hasil laut yang illegal guna mempertahankan kekayaan laut di negara Anggota ASEAN.

Kebijaksanaan

Kebijaksanaan dalam integrasi Regional diartikan oleh Nye sebagai tolak ukur sejauhmana suatu kelompok negara dalam hal ini ASEAN ketika membuat kebijaksanaan atau juga disebut mengambil keputusan dalam negri maupun luar negeri. Dalam mengukur tingkat integrasi kebijaksanaan adanya indikator antara lain *pertama* ruang lingkup kebijaksanaan yang ditandatangani bersama, *kedua* seberapa banyak partisipasi dalam kebijaksanaan tersebut, *ketiga* makna penting kebijaksanaan tersebut terhadap integrasi.

Indikator pertama yakni ruang lingkup kebijaksanaan yang ditandatangani bersama dalam hal ini ASEAN jika mengambil keputusan pasti melalui konsensus dari negara naggotanya sehingga ruanglingkup yang digunakan yakni ASEAN dan juga ruang lingkup yang berkaitan dengan anggota ASEAN seperti mitra wicara ASEAN. indikator ini terpenuhi karena ASEAN dalam mengambil keputusan sangatlah bijaksana termasuk peran para negara

anggotanya didalamnya yang berperan dalam membentuk kebijaksanaan atau keputusan tersebut.

Indikator kedua yakni seberapa banyak partisipasi dalam kebijaksanaan tersebut yang dimaksud adalah seberapa banyak partisipasi dalam hal ini negara anggota ASEAN membantu untuk menyelesaikan kebijaksanaan tersebut. Dari indikator ini ASEAN memenuhinya dengan semua negara pasti berpartisipasi didalam kebijaksanaan atau keputusan yang ada karena hal tersebut diputuskan bersama oleh negara anggota dan membuat terlaksananya kebijaksanaan tersebut sangatlah besar. Sepertihalnya ASEAN Community yang mana semua negara ASEAN bersama-sama menyepakati dan akan semua negara akan berpartisipasi dalam menjalankannya.

Indikator ketiga yakni makna penting kebijaksanaan tersebut terhadap integrasi. Jika dilihat dari seberapa penting keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh ASEAN untuk para anggotanya sangatlah penting. Karena di ASEAN banyak hal-hal umum hingga detail diatur disana. Hingga semua keputusan yang diciptakan sangatlah berguna. Jika dilihat dari kebijaksanaan atau keputusan saat ASEAN menyepakati ASEAN Community maka semua negara anggotanya mendukung hal tersebut tak terkecuali Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam membantu terlaksananya ASEAN Community tersebut karena banyak inisiasi Indonesia yang dipakai dalam mempersiapkan ASEAN Community. (Nye, 1971)

Indonesia memiliki peran penting dalam terciptanya pilar masyarakat politik keamanan ASEAN. Hal ini selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia hingga kini dengan banyak melibatkan jajarannya dalam membantu banyak konflik baik didalam ASEAN maupun di luar ASEAN agar adanya citra ASEAN di global melalui Indonesia terbentuk. Melalui mendorong para anggota ASEAN meratifikasi protokol *South East Asia Waepon-Free Zone* (SEANWFZ), menggagas formula 3+1 dalam sengketa laut China Selatan, membentuk *ASEAN Institute for*

Peace and Reconciliation yang berguna untuk meningkatkan kapabilitas dibidang *peace promotion* dan Rekonsiliasi konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara, aktif berkontribusi dalam radikalisasi melalui ASEAN *Convention on Counter Terrorism*, membentuk *ASEAN Maritime Forum* (AMF) guna membahas isu seperti *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) di Asia Tenggara serta mendorong untuk dibentuk peraturan terkait IUUF di Asia Tenggara.